

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 3

### SURAT IZIN PENELITIAN

		<b>KEMENTERIAN PERTAHANAN RI</b> <b>UNIVERSITAS PERTAHANAN</b> Terakreditasi BAN-PT "A"
Nomor	: B/ 2343 /X/2020	Bogor, 12 Oktober 2020
Klasifikasi	: Biasa	
Lampiran	: 1 (satu) Lembar	
Hal	: Permohonan Izin Penelitian	Kepada
		Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran di Tempat
1. Dasar:		
a.	Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;	
b.	Kalender Pendidikan Program Studi Damai Dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Unhan TA. 2019/2020.	
2. Sehubungan dasar diatas, dengan hormat disampaikan bahwa:		
a.	Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.	
b.	Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Unhan atas nama Hana Nabila NIM:120190303016, Nomor HP: 081226538784, email: hanabilamadjid@gmail.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Implikasi Pemberitaan Media Arus Utama Terhadap Ketahanan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19."	
3.	Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.	
4.	Demikian untuk menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.	
		a.n. Rektor Universitas Pertahanan Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,
		 Dr. Jonni Mahroza, S.P., M.A., M.Sc., CIQnR., CIQaR Mayor Jenderal TNI
Tembusan:		
1.	Menkominfo RI	
2.	Sekjen Kemhan RI	
3.	Rektor Unhan	
4.	Dekan FKN Unhan	
5.	Karo AK Unhan.	
		Jl. Salemba Raya No.14 Jakarta Telepon 021-29618766

Lampiran Surat Rektor Unhan  
Nomor : B / 2343 / X / 2020  
Tanggal : 12 Oktober 2020

#### DAFTAR PEJABAT

- 1) Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- 2) Kepala Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.
- 3) Ketua JBK Indonesia, Jurnalis Bencana dan Krisis (JBK) Indonesia.
- 4) Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah dan Hoaks (MAFINDO).
- 5) Peneliti CfDS, *Center for Digital Society* (CfDS) Universitas Gadjah Mada.
- 6) Direktur Eksekutif SISJ, *The Society of Indonesian Science Journalist* (SISJ).

a.n. Rektor  
Universitas Pertahanan  
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

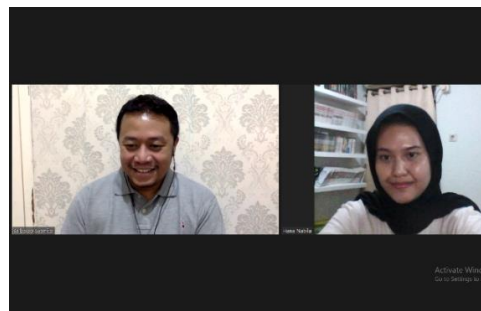


Dr. Jonni Manroza, S.P., M.A., M.Sc., CIQnR., CIQaR  
Mayor Jenderal TNI

**LAMPIRAN 2**  
**DOKUMENTASI FOTO**



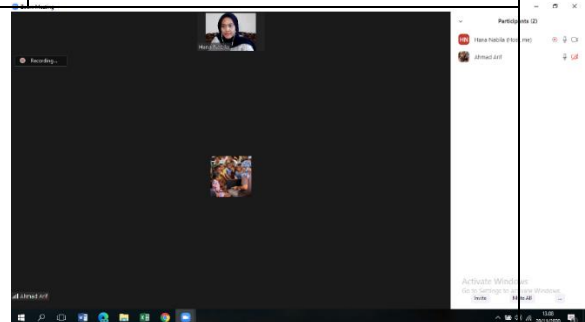
Wawancara dengan Deputy IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Juri Ardiantoro



Wawancara virtual melalui Zoom dengan Co Founder Masyarakat Anti Fitnah dan Hoaks (MAFINDO), Aribowo Sasmito.



Wawancara virtual melalui Google Meets dengan Presiden Direktur The Society of Indonesia Science Journalists (SISJ), Dyna Rochmyaningsih



Wawancara virtual melalui Zoom dengan Ketua Jurnalis Krisis dan Bencana (JKB), Ahmad Arif.

## LAMPIRAN 2

### RESUME WAWANCARA

Narasumber	Juri Ardiantoro - Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
Waktu wawancara	Jumat, 4 Desember 2020
<p><b>1) Strategi komunikasi seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola komunikasi publik selama masa adaptasi kebiasaan baru?</b></p> <p>Pemerintah mengikuti arahan WHO sebagai <i>leading sector</i> bidang kesehatan dunia dalam menangani pandemi, termasuk dalam aspek komunikasi. Strategi utama yang dilakukan adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui penyampaian informasi yang baik, benar dan tepat waktu melalui kanal-kanal resmi seperti press conference, media center, media sosial, dll.</p> <p>Selain itu, pelibatan masyarakat (<i>Community Engagement</i>) juga menjadi strategi penting. Pemerintah menggunakan strategi Pentahelix (pemerintah, akademisi, media, komunitas, pengusaha) untuk memastikan berbagai informasi tersampaikan kepada masyarakat secara menyeluruh. Strategi ini dilaksanakan dengan koordinasi erat antar berbagai pihak.</p> <p>Dalam rangka menerapkan adaptasi kebiasaan baru, pemerintah juga menerapkan dan menghimbau masyarakat untuk menerapkan "<i>behavioural design</i>" yaitu penunjuk-penunjuk dan fasilitas untuk melakukan 3M (Menjaga jarak, Mencuci tangan dan Memakai Masker), seperti wastafel di pintu masuk, pengingat memakai masker, dll.</p> <p>Terakhir, Presiden Joko Widodo juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang menjadi bagian dari strategi mendorong terjadinya perubahan perilaku di masyarakat.</p>	
<p><b>2) Adakah perbedaan dalam strategi informasi dan komunikasi politik ketika Covid-19 baru terdeteksi di Indonesia dengan kondisi <i>new normal</i> saat ini?</b></p> <p>Tentu strategi komunikasi yang dijalankan oleh tim informasi dan komunikasi politik disesuaikan dengan perkembangan keadaan pandemi. Di bulan Februari – April 2020, fokus besar pemerintah adalah untuk memantapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seiring dengan waktu ketika pemahaman masyarakat terhadap COVID-19 sudah meningkat, kini fokus beralih kepada mendorong perubahan perilaku di masyarakat.</p>	
<p><b>3) Bagaimana strategi pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19?</b></p>	

Strategi utama adalah untuk menghadirkan informasi yang tepat waktu, baik dan benar kepada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengembangkan berbagai kanal komunikasi resmi yang bisa menjadi acuan bagi berbagai pihak. Pada kanal-kanal tersebut dihadirkan informasi dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk dari ahli. Konten yang dihadirkan dijaga agar konsisten dan tepat waktu diberikan kepada masyarakat.

**4) Bagaimana pola distribusi informasi dari pemerintah kepada publik melalui media massa?**

Media massa menjadi pilar penting dalam komunikasi pentahelix, terutama dalam mengabarkan informasi kepada masyarakat dan juga dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat. Secara konsisten dan berkala, pemerintah memberitakan informasi melalui media center yang menghasilkan video dan press release yang dapat diamplifikasi oleh media massa. Pemerintah dan media massa juga bekerjasama untuk menjawab berbagai aspirasi masyarakat melalui serangkaian talkshow, dialog, dll.

**5) Sejauh ini, apakah media massa *online* memberitakan langkah dan kebijakan terkait Covid-19 sesuai harapan?**

Media massa online juga merupakan kelompok penting dalam memberitakan Langkah dan kebijakan terkait COVID-19. Selama ini media massa online telah secara sigap mengamplifikasi kebijakan-kebijakan pemerintah dan menjadi ruang untuk pendalaman kebijakan-kebijakan tersebut.

**6) Bagaimana pemerintah menilai dan menanggapi pemberitaan mengenai Covid-19 selama ini?**

Pemberitaan mengenai COVID-19 yang dilakukan oleh media sangat membantu kerja pemerintah dalam melakukan sosialisasi kebijakan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah berterima kasih kepada media atas kesadaran media menjaga informasi yang baik, benar dan berimbang dalam masa pandemic yang membantu menjaga masyarakat agar tidak panik.

**7) Pemberitaan seperti apa yang dapat meningkatkan solidaritas selama masa adaptasi kebiasaan baru?**

Tim komunikasi COVID-19 selalu mencari cerita-cerita humanis yang dilakukan oleh masyarakat yang menunjukkan solidaritas tinggi, seperti misalnya pembagian sembako oleh masyarakat, menjaga tetangga yang harus isolasi, dll. Cerita-cerita tersebut diamplifikasi dengan harapan memberi inspirasi bagi masyarakat untuk berbuat yang serupa.

**8) Menimbang distribusi pemberitaan oleh media *online* yang membuka kesempatan bagi publik untuk menanggapi di berbagai *platform*, apakah pembicaraan publik di media sosial mempengaruhi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait tata kelola Covid-19?**

Salah satu fungsi penting yang dilakukan oleh tim komunikasi pemerintah adalah "listening". Pemerintah memonitor berbagai kanal di berbagai

platform untuk melihat apa saja yang menjadi aspirasi publik dan bagaimana pemerintah dapat menjawab aspirasi tersebut.

**9) Jika ya, kebijakan apa dan bagaimana prosesnya?**

Sebagai contoh, dalam menyusun kebijakan road-map vaksinasi covid-19 menggunakan dasar hasil survey penerimaan masyarakat yang dilakukan terhadap 115.000 responden.

**10) Bagaimana pemerintah melihat respon masyarakat di media sosial terkait kebijakan dan penanganan Covid-19?**

Respon masyarakat tentu beragam. Beberapa kebijakan disambut baik oleh masyarakat dan ada juga yang dipertanyakan. Seluruh respon ini adalah bentuk valid dari aspirasi masyarakat dan digunakan untuk evaluasi pelaksanaan program bagi masyarakat.

**11) Strategi komunikasi seperti apa yang dilakukan pemerintah agar ketahanan masyarakat selama masa adaptasi kebiasaan baru meningkat?**

Melalui komunikasi, pemerintah mengajak masyarakat untuk terus beradaptasi dengan kebiasaan baru melalui pesan yang berulang di media mainstream dan juga meningkatkan pelibatan masyarakat di lapangan.

**12) Salah satu tugas KSP adalah memastikan kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik kepada kelompok masyarakat dan kelompok strategis sehingga tidak terjadi mispersepsi bahkan timbul resistensi dari masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Bagaimana KSP menilai tanggapan publik terhadap kebijakan pemerintah terkait Covid-19 terutama selama masa *new normal*?**

Selama masa pandemic, langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah bersifat sangat dinamis seiring dengan perkembangan dan kajian yang semakin kaya. Berbagai kelompok publik yang sudah dirangkul sejak awal dapat menerima kebijakan-kebijakan yang diambil karena memang sudah terjalin sinergi dengan kelompok-kelompok masyarakat yang strategis.

Narasumber	Semuel S. Pengarepan – Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia
Waktu	21 Januari 2021
<p>1) Penelitian ini berangkat dari temuan Drone Emprit mengenai persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19. Salah satunya ketika narasi New Normal dikampanyekan pemerintah pada Mei dan Juni lalu. Berikut adalah peta jaringan sosial yang ditemukan melalui Social Network Analysis pada platform Twitter yang dirilis oleh Drone Emprit (<a href="https://pers.droneemprit.id/new-normal-dan-psbb-transisi/">https://pers.droneemprit.id/new-normal-dan-psbb-transisi/</a>). Terdapat tiga kluster utama; kluster pro government,</p>	

**pro opposant, dan kluster media massa sebagai information arbitrage. Kluster media massa kemudian diketahui banyak mendapat engagement berupa replies, likes, dan retweet sebagai back up bagi kelompok pro opposant. Bagaimana kemudian Kominfo menanggapi fenomena ini?**

Di era digital, media sosial telah menjadi ruang interaksi baru bagi masyarakat, tidak terkecuali dalam merespon bentuk-bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adanya pandemi juga semakin memperkuat peran media sosial sebagai ruang interaksi masyarakat. Maka dari itu, menjadi hal yang wajar apabila ditemukan berbagai sentimen dari masyarakat yang muncul di media sosial, dalam hal ini khususnya Twitter, karena di Kemenkominfo sendiri juga kami secara rutin melakukan analisis sentimen terhadap pembicaraan warganet di beberapa platform media sosial, salah satunya Twitter.

Hasil sentimen analisis tersebut pun kami olah untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, khususnya kebijakan komunikasi publik yang merupakan ranah Kementerian Kominfo. Meski demikian, data yang dikumpulkan dari pembicaraan di platform media sosial pun perlu dianalisis lebih lanjut mengingat tidak semua pembicaraan yang terekam merupakan pembicaraan yang otentik dan organik, melainkan terdapat berbagai fenomena noise yang diisi oleh automated bot maupun fake accounts. Analisis sentimen ini juga merupakan salah satu upaya Kemenkominfo dalam mencegah penyebaran konten negatif seperti hoaks, karena tidak jarang informasi yang tersebar adalah disinformasi yang dapat menyebabkan keresahan di masyarakat.

- 2) Mengacu pada panduan komunikasi risiko di masa krisis kesehatan yang dikeluarkan oleh WHO, salah satu upaya untuk mencapai tujuan dari komunikasi risiko adalah terjadinya komunikasi multiarah antara pemerintah dengan berbagai pihak termasuk masyarakat, bukan hanya dalam bentuk sosialisasi. Melihat pembicaraan di akar rumput di media sosial, terutama Twitter, yang marak menanggapi berbagai kebijakan pemerintah selama masa New Normal, apakah kemudian berimplikasi pada proses pengambilan kebijakan terkait penanganan Covid-19?**

Proses pengambilan kebijakan tentang penanganan COVID-19 merupakan ranah dari Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19, sedangkan Kementerian Kominfo lebih ke arah kewenangan yang berkaitan dengan komunikasi publik. Terkait percakapan yang terjadi di media sosial seperti Twitter, Kementerian Kominfo mempelajari isu COVID-19 yang berkembang dengan menggunakan analisis media sosial. Hasil analisis itu akan menentukan lebih ke bagaimana cara pemerintah merespon pembicaraan yang ada di masyarakat, terkhusus apabila narasinya yang beredar di ranah media sosial sudah mengarah kepada hoaks ataupun misinformasi.

Temuan-temuan terkait hoaks ataupun misinformasi tentang COVID-19 tersebut akan diverifikasi dan akan diberikan stempel “hoax” atau “misinformasi” dan dikomunikasikan atau disosialisasikan kembali kepada publik. Proses penyebaran informasi yang telah diverifikasi juga tidak hanya

dilakukan oleh Kementerian Kominfo saja, tetapi ke semua instansi jika memang ada temuan yang harus diklarifikasi.

**3) Apakah sejauh ini ditemukan berita hoaks terkait tata kelola penanganan Covid-19 oleh pemerintah yang disebarluaskan melalui akun resmi media massa online di Twitter? Langkah apa yang dilakukan oleh Kominfo melalui Ditjen APTIKA untuk mengatasi persoalan tersebut?**

Berdasarkan data yang kami peroleh melalui Direktorat Pengendalian Aplikasi & Informatika, sejak 23 Januari 2020 hingga 13 Januari 2021, kami telah menemukan 1.346 topik hoaks yang berkaitan dengan COVID-19. Melihat pada besarnya dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya persebaran hoaks, kami telah menurunkan (take-down) 1.886 konten hoaks dari total 2.137 konten hoaks terkait COVID-19 di berbagai platform media sosial. Sebelum dilakukannya tindakan berupa takedown konten dan penutupan akses, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, antara lain:

a) Tahap pelaporan, penemuan, dan rekomendasi

Kemenkominfo secara aktif mencari peredaran konten negatif, termasuk diantaranya merupakan konten hoaks yang berkaitan dengan isu COVID-19. Kemenkominfo juga menerima rekomendasi laporan terkait peredaran konten hoaks dari K/L terkait, untuk kemudian diverifikasi dan dilakukan penindakan. Masyarakat juga dapat ambil bagian dalam melawan peredaran konten ilegal di ruang digital, dengan mengajukan aduan konten melalui aduankonten.id.

b) Tahap verifikasi

Semua hasil laporan dari masyarakat, temuan dari patroli siber, dan rekomendasi dari K/L terkait akan diverifikasi oleh Kemenkominfo untuk kemudian dilakukan penindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam tahapan verifikasi, Kemenkominfo terus bekerjasama dengan stakeholders yang tidak hanya diisi oleh institusi pemerintah terkait, tetapi juga bekerjasama dengan berbagai civil society organization (e.g. MAFINDO) dan berbagai media mainstream.

c) Tahap penindakan

Jika konten terkait telah terverifikasi sebagai konten hoaks/, maka Kemenkominfo dapat melakukan take down konten hingga blokir akses, apabila platform/website yang memuat konten negatif tersebut tidak kooperatif dalam menanggapi laporan dari Kemenkominfo. Jika konten tersebut telah menimbulkan konsekuensi hukum pidana, maka Kemenkominfo akan meneruskan kasus tersebut ke aparat penegak hukum untuk selanjutnya dilakukan penindakan.

d) Tahap diseminasi

Setiap konten hoaks yang sudah ditangani akan segera didiseminasikan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) lewat berbagai kanal/platform media.

**4) Apa upaya yang dilakukan Kominfo untuk memperkecil celah informasi hoaks maupun infodemi tersebar luas terutama pada situasi krisis kesehatan seperti saat ini?**

Dalam penanggulangan hoaks dan infodemi, Kemenkominfo berfokus pada pendekatan di tiga level, yaitu di level upstream (hulu), middle stream (tengah), dan downstream (hilir). Di tingkat hulu, kami berfokus pada upaya literasi digital, dimana kami bekerja sama dengan 108 komunitas, akademisi, dan lembaga pemerintah untuk melaksanakannya melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Di tingkat tengah, kami berfokus pada kolaborasi dengan platform teknologi, untuk melakukan serangkaian tindakan preventif dalam memblokir akses dan menurunkan (take-down) konten dari situs web, platform digital, atau akun media sosial yang menyebarluaskan hoaks. Masih di tingkat tengah, Kemenkominfo juga berfokus pada intervensi teknologi untuk menangani persebaran hoaks, dimana kami melakukan patroli siber untuk menemukan konten-konten hoaks, menyediakan layanan aduan konten untuk masyarakat, serta menghadirkan aplikasi-aplikasi yang harapannya dapat menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat, seperti aplikasi pelacakan kontak dan vaksinasi COVID-19 yang dinamakan PEDULI-LINDUNGI.

Di tingkat hilir, Kemenkominfo mendukung tindakan penegakan hukum untuk mencegah penyebaran informasi hoaks yang dapat menimbulkan kekacauan lebih lanjut kepada masyarakat, dengan bermitra dan berkoordinasi dengan berbagai elemen penegak hukum. Dalam melakukan penanganan hoaks pada tiga level tersebut, Kemenkominfo percaya bahwa upaya untuk melawan hoaks merupakan upaya kolektif yang harus dilakukan bersama-sama dengan berbagai aktor kepentingan, baik itu dari pemerintah, sektor privat, akademisi, komunitas masyarakat, dan media (kolaborasi pentahelix).

**5) Pemerintah saat ini telah melakukan langkah strategis berkaitan tata kelola data melalui Satu Data Indonesia. Kaitannya dengan Covid-19, beberapa pekan terakhir marak perbincangan mengenai selisih data kematian akibat Covid-19 di pusat dan daerah. Bagaimana tanggapan Kominfo?**

Pertama, adanya perbedaan karena data yang beredar di masyarakat adalah raw data yang belum dibersihkan (data cleansing). Terlebih lagi karena sumber data tentang kematian COVID-19 itu berasal dari banyak sumber (e.g. Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas) yang kemudian dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan dan data tersebut sangat cair karena tiap saat berubah. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya data cleansing.

Kedua, dalam hal manajemen data, institusi pemerintah/organisasi perlu berfokus pada beberapa hal, diantaranya:

a) Pentingnya mengetahui tujuan penggunaan data

Hal ini penting untuk dijawab karena akan berpengaruh terhadap beberapa aspek lainnya, seperti data apa saja yang harus dikumpulkan, cara pengambilan data, cara penyimpanan data, siapa yang berhak mengakses data, bagaimana cara mengakses dan menganalisis data, dll. Maka dari itu, penting untuk memiliki kerangka manajemen data, agar

data-data yang dikumpulkan tersebut bersifat seragam dan dapat digunakan lintas institusi/organisasi, atau yang juga disebut sebagai interoperabilitas data. Setelah selesai dengan penentuan kerangka proses manajemen data, hanya demikian institusi/organisasi dapat bergerak untuk menentukan jenis teknologi dan fitur-fitur apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan proses manajemen data yang diinginkan.

- b) Menemukan titik keseimbangan antara *data governance* dan *data democratisation*

Walaupun telah memiliki kerangka proses manajemen data, namun hal tersebut tidak berarti bahwa data itu harus 'disembunyikan' atau 'dihalangi' persebarannya. Sebaliknya, data yang terlalu 'bebas/tidak beraturan' tanpa adanya kerangka proses manajemen data juga memungkinkan terjadinya kebocoran data dan inefektivitas penggunaan data.

- c) Pentingnya memiliki kultur *data-driven* dalam institusi/organisasi

Kultur data-driven disini berbicara mengenai 2 hal, yaitu kualitas SDM dan kapasitas teknologi yang digunakan dalam proses manajemen data. Pertama, kualitas SDM perlu ditingkatkan agar mereka terbiasa untuk bekerja dengan data, khususnya memahami bagaimana proses manajemen data dan hal-hal apa saja yang dapat didapatkan dari penggunaan data. Kedua, ketersediaan teknologi yang user-friendly juga penting untuk hadir, mengingat semakin mudah pengoperasian sebuah teknologi manajemen data, maka akan semakin banyak pengguna pula yang memahami bagaimana proses manajemen data tersebut dilakukan secara otomatis dengan menggunakan teknologi.

Berkaitan dengan kebijakan Satu Data Indonesia, Kemenkominfo mendukung penuh implementasi kebijakan ini, salah satunya dengan menyediakan Pusat Data Nasional yang rencananya akan dibangun di 4 titik wilayah Indonesia. PDN ini nantinya akan menjadi pool data bagi seluruh instansi pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, yang merupakan salah satu upaya perwujudan interoperabilitas data di lingkungan pemerintah untuk proses pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Setelah pembangunan PDN diselesaikan secara bertahap, pemerintah juga berencana mengembangkan hybrid cloud yang kelak tidak hanya dapat digunakan untuk mengintegrasikan data-data dari pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh sektor bisnis lainnya.

#### **6) Bagaimana proses pemanfaatan data untuk menunjang kebijakan terkait penanganan Covid-19**

Dalam rangka penanganan COVID-19, Kemenkominfo bersama dengan institusi pemerintah lainnya sangat bergantung pada data dalam menghasilkan kebijakan pencegahan dan penanganan COVID-19. Selama berlangsungnya pandemi, beberapa institusi pemerintahan juga telah mengeluarkan beberapa sistem informasi berupa aplikasi dan website, yang utamanya dipergunakan untuk keperluan pelacakan (tracing) persebaran virus COVID-19 dan diseminasi informasi yang

kredibel terkait virus COVID-19 (contoh: aplikasi PeduliLindungi, PCare, Bio Trace and Track, SMILE, dll.)

Meskipun demikian, Kemenkominfo juga menyadari bahwa pengumpulan data saja tidaklah cukup, melainkan data tersebut perlu disusun dan diintegrasikan, agar selanjutnya dapat dianalisis untuk bahan pengambilan kebijakan.

Sebagai contoh, saat ini tengah dibangun sistem informasi vaksinasi COVID-19 yang merupakan sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk persiapan, pelaksanaan vaksinasi, proses pelaporan, monitoring, dan evaluasi dalam penyelenggaraan vaksinasi (COVID-19). Inisiatif ini merupakan hasil kerjasama Kemenkominfo, Kemenkes, beserta PT. Telkom Indonesia.

#### **7) Bagaimana literasi digital berperan di masa pandemi saat ini?**

Selain data, aspek kecakapan pengguna dalam memahami dan menggunakan teknologi digital juga berperan penting dalam proses pencegahan dan penanganan COVID-19. Mengapa demikian? Karena saat ini, kita tidak hanya menghadapi persebaran virus COVID-19 itu sendiri (pandemi), namun juga kita harus menghadapi persebaran berbagai jenis kekacauan informasi yang terkait dengan virus COVID-19, atau yang kita sebut dengan istilah infodemi. WHO sendiri juga telah mengidentifikasi bahaya persebaran infodemi, dimana setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang paling memprihatinkan yang timbul dari fenomena infodemik, yaitu:

- a) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap situasi dan prosedur medis yang tepat, sehingga menimbulkan permasalahan seperti stigmatisasi Covid-19 terhadap tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 yang berpotensi menimbulkan permasalahan sosial lainnya.
- b) Muncul kasus penipuan online dengan alasan medis seperti penipuan penjualan masker medis.

Maka dari itu, selain berupaya untuk menghasilkan upaya-upaya intervensi teknologi, Kemenkominfo bersama dengan stakeholders juga terus berfokus untuk meningkatkan literasi digital masyarakat melalui 3 stimulus pelatihan kecakapan digital, yaitu:

- a) Kemampuan literasi digital dasar, yang terangkum dalam program-program Siberkreasi; → pada tahun 2021 ditargetkan 12,4 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan pelatihan literasi digital tingkat dasar.
- b) Kemampuan digital tingkat intermediate, yang terangkum dalam program Digital Talent Scholarship; dan
- c) Kemampuan digital tingkat advance, yang terangkum dalam program Digital Leadership Academy.

Adanya stimulus pelatihan literasi digital yang telah disusun diharapkan mampu meningkatkan kecakapan digital masyarakat dalam memahami

dan menggunakan teknologi digital, dimana hal tersebut tentu akan sangat membantu upaya kita bersama dalam melawan tidak hanya pandemi, namun juga infodemi

<b>Narasumber</b>	<b>Ahmad Arif – Ketua Jurnalis Krisis dan Bencana</b>
<b>Waktu Wawancara</b>	<b>28 November 2020</b>
<p><b>1) Bagaimana media membangun narasi mengenai Covid-19 selama masa new normal saat ini?</b></p> <p>Cenderung bervariasi. Saya sendiri di Kompas, menulis tentang Covid sejak 6 Januari 2020. Saya waktu itu menulis tentang penyakit yang berkaitan dengan pernafasan di Cina. Kami di Kompas banyak yang menulis mengenai pentingnya screening yang baik agar wabah bisa dideteksi lebih dini dan tidak menyebar lebih jauh.</p> <p>Tapi kemudian kita semua tahu di Januari-Februari nampaknya memang kita terlambat untuk mengantisipasi wabah ini. Setelah itu pemberitaan di media lebih banyak kepada kasus-kasus yang bermunculan. Selain itu juga dampak dari wabah ini pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.</p> <p>Kami di JKB tidak hanya memberitakan mengenai dampak sosial ekonomi tetapi juga dampak positifnya seperti praktik-praktik baik, masyarakat yang saling bantu dalam kondisi yang sulit, kemudian effort dari teman-teman nakes (tenaga kesehatan) dalam menghadapi pandemi ini. Jadi intinya kita upayakan pemberitaan dua sisi, ada suatu persoalan, namun juga solusi-solusi di baliknya. Baik yang sifatnya swadaya maupun kebijakan. Kaitannya dengan kebijakan mungkin yang banyak disinggung adalah komunikasi resiko sejak awal cenderung kurang konsisten, keterbatasan jumlah tes dan tracing.</p> <p>Banyak juga pemberitaan sisi lainnya seperti kelompok-kelompok yang berjuang pada pandemi ini. Selain itu juga pemberitaan mengenai penyakit itu sendiri melalui perspektif scientific-nya, resiko, penularannya, termasuk apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah penularan seperti menerapkan 3M.</p> <p><b>2) Sudah sempat disinggung mengenai pemberitaan terhadap kebijakan pemerintah. Bagaimana kemudian jurnalis memberitakan tentang kebijakan pemerintah di masa new normal?</b></p> <p>Kami dari awal sudah banyak memunculkan narasi berkaitan dengan kampanye new normal dari pemerintah. Bahkan sejak Mei dan Juni ketika pemerintah gencar mengkampanyekan new normal ketika kasus belum mencapai puncaknya, kita banyak mengeluarkan artikel mengenai hal tersebut. Seperti melakukan wawancara dengan para scientist, epidemiolog untuk kemudian membahas bahwa sebetulnya kebijakan tersebut kurang tepat jika ditinjau melalui sains.</p>	

Kita runut kembali pada masa pemerintah mengkampanyekan new normal secara serius bahkan sampai mengadakan lomba pada saat itu. Meskipun di satu sisi, kita (jurnalis) mengetahui bahwa Covid-19 berdampak pada ekonomi, namun mendorong new normal pada saat itu dampaknya lebih besar. Hal itu juga terbukti sekarang, dimana masyarakat jadi cenderung abai terhadap pandemi ini, sudah banyak yang melupakan protokol kesehatan, bahkan narasi-narasi yang mengarah pada konspirasi Covid-19 ini terus meluas di akar rumput. Ini tidak lepas dari kontribusi pemerintah yang inkonsisten dalam melakukan komunikasi resiko.

Saya membahasakan new normal dalam situasi ini seperti oksimoron. Jadi kontradiktif kata yang terjadi ini seharusnya tidak disampaikan pada saat itu. Dalam situasi seperti itu (angka penyebaran belum menurun) kata new normal seharusnya merujuk pada normal baru yang berarti kebiasaan-kebiasaan baru yang harus dibentuk, bagaimana berperilaku di rumah, tempat umum, dan angkutan umum. Di pedoman komunikasi resiko yang dirilis oleh WHO pun disampaikan bahwa new normal adalah situasi yang dapat terjadi pada fase rehabilitasi bencana. Bencana itu sebuah siklus, ada pra-bencana, krisis, dan pasca-bencana. Sesungguhnya saat ini kita masih di masa krisis, sehingga belum saatnya untuk berbicara soal new normal yang idealnya terlaksana pada pasca-bencana. Dengan penularan yang sangat tinggi, yang kita pun belum tahu kapan puncaknya terjadi, mengkampanyekan new normal justru akan membuat masyarakat lengah.

Di banyak negara lain ketika angka penularan masih sangat tinggi, yang dilakukan adalah pembatasan. Contohnya Vietnam, China, dan Australia. Jadi ketika angka penularan masih tinggi yang dilakukan adalah melakukan intervensi sosial, melarang orang untuk berkerumun dan melakukan pembatasan sosial. Sebaliknya juga ketika orang-orang di sektor informal dan pekerja harian yang pekerjaannya tidak bisa dilakukan dari rumah, juga diberikan insentif oleh pemerintah. Kalau di negara kita seolah dikembalikan ke individu masing-masing.

Kalau bicara soal apa yang kita lakukan sebagai jurnalis, salah satu tugas media adalah menjadi watchdog. Maka kita memang diharuskan untuk mengawasi kebijakan pemerintah, apabila ada yang keliru juga harus kita peringatkan melalui karya jurnalistik tentunya. Karena kosekuensinya berimbas ke segala aspek di masyarakat.

### **3) Bagaimana jurnalisme data berperan dalam pandemi Covid-19 di Indonesia?**

Sampai sekarang permasalahan data menjadi sorotan utama dalam kemelut pandemi ini. Persoalan data juga membuat jurnalis kesulitan untuk melaporkan situasi apa adanya. Jadi ada dua hal yang disoroti perihal data di sini (Indonesia); yang pertama kualitas data bisa dibilang tidak cukup baik, tidak cukup baik yang dimaksud adalah tidak lengkap. Contohnya soal jumlah tes yang dilakukan. Sampai saat ini belum ada informasi yang berisi berapa jumlah tes yang dilakukan di suatu daerah, di kabupaten maupun kota. Sampai sekarang kita para jurnalis belum pernah mengakses informasi semacam itu. Implikasinya publik tidak tahu mengenai kecukupan tes di kabupaten atau

kotanya. Padahal jumlah tes itu menentukan besar kecilnya kasus yang ditemukan. Ini menjadi indikator ketika jumlah tes kecil maka kasus positif yang ditemukan juga kecil. Sehingga yang terjadi misalnya suatu daerah dikatakan sebagai zona hijau, bisa jadi karena jumlah tesnya yang kurang sehingga kasusnya cenderung sedikit. Kedua, ada kecenderungan pemilahan data. Dalam artian ada kesengajaan jumlah kematian ditekan. Jadi implikasinya membuat kesan bahwa Covid-19 tidak seberbahaya itu. Praktisi komunikasi kemudian melihat ini kecenderungan komunikasi pemerintah yang sifatnya menenangkan. Tujuannya untuk menenangkan masyarakat tapi kemudian mengorbankan transparansi dan fakta sesungguhnya.

Contoh real-nya inkonsistensi data yang terjadi beberapa hari ini adalah jumlah kematian yang dilaporkan daerah dengan yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Satgas selisihnya jauh. Termasuk yang dilaporkan oleh teman-teman dari Kawal Covid-19. Misal data dari Pemprov Jawa Tengah, jumlah kasus yang dilaporkan berbeda dengan yang dirilis oleh Kemenkes. Termasuk juga jumlah kematian, ada selisih sampai 1.200 kasus kematian di Jawa Tengah yang tidak disampaikan oleh Kemenkes. Di Pemda Jateng yang disampaikan jumlah kematian sekitar 3.200 jiwa sedangkan yang dilaporkan oleh Kemenkes 2000 sekian jiwa. Konsekuensinya publik di Semarang, dan kota-kota lain, bahkan skala nasional akan berpersepsi bahwa dampak Covid tidak sebesar itu. Selanjutnya bisa membuat masyarakat abai dan sebagainya.

Contoh lainnya juga data soal penularan. Jika kita membandingkan dengan kasus-kasus di negara lain, jika seseorang teruji klinis positif Covid-19, akan ada informasi mengenai pasien tersebut. Perjalanannya jelas dari mana saja, ke mana saja. Jadi kasus nomor sekian ini jelas melakukan perjalanan kemana saja dan memiliki hubungan dengan kasus nomor berapa. Dengan data secara scientific seperti akan menjadi bukti bahwa penularan Covid memang terjadi. Ini akan menekan spekulasi atau dugaan orang bahwa Covid-19 sebenarnya tidak ada. Misal bulan Juni lalu di Kota Busan, Korea Selatan ada 2 kasus baru. Di website Kota Busan ini terlihat bahwa dua orang ini sebelumnya melakukan perjalanan dari Madura, Indonesia. Menggunakan transportasi apa saja dari Madura sampai Busan tercatat di website tersebut, pun waktu perjalanannya.

Di Indonesia sendiri informasi seperti ini tidak ada. Riwayat perjalanan kasus ini penting meskipun tidak mencantumkan nama karena berkaitan dengan privasi. Informasi seperti ini akan sangat membantu masyarakat umum, juga jurnalis dalam membuat laporannya juga dapat mengutip informasi ini secara resmi. Sehingga menurut saya, melalui informasi ini akan membuat publik sadar bahwa Covid-19 ini tidak ujug-ujug ada, terdapat riwayatnya, jadi orang tahu tempat mana yang harus dihindari.

Contoh lain, informasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Singapura. Bahwa terdapat kluster gereja dimana dari satu acara keagamaan di gereja bisa memicu penularan sekian banyak orang. Ini detail dan menjadi produk scientific yang kemudian bisa diserap oleh publik melalui berbagai medium di antaranya media massa setelah melalui proses pengutipan. Di Indonesia sampai saat ini informasi seperti itu hampir gelap (tidak ada). Misal ketika pemerintah Indonesia bicara soal kluster perkantoran, justru tidak dibukakan ke publik bahwa salah satu kantor Kementerian Kesehatan justru menjadi salah satu kluster terbesar. Jadi sebetulnya inkonsistensi kebijakan ini mulanya adalah inkonsistensi data.

Sehingga publik bisa kehilangan kepercayaan dan lebih jauh menjadi memperlebar ketidakpatuhan, misinformasi juga lebih mudah masuk. Bagi jurnalis sendiri juga menjadi hambatan dalam menyajikan informasi berdasarkan data yang baik. Data dari sumbernya saja tidak transparan.

**4) Kemudian apa yang dilakukan Jurnalis Bencana dan Krisis (JBK) dihadapkan pada persoalan ini?**

JBK saat ini sudah memasuki proses legal. Kita sudah terbentuk sejak tahun lalu sebelum pandemi. Background sebetulnya lebih ke jurnalisme bencana, bencana alam dan lainnya termasuk krisis kesehatan.

Kalau untuk JBK sendiri kita menghadapi dua hal. Pertama, resiko terpapar virus ini, memang resiko pekerjaan terutama untuk teman-teman TV yang lebih sering untuk hadir langsung wawancara dengan narasumber. Kita di JBK sudah mengeluarkan panduan mengenai peliputan di masa pandemi dan protokol-protokol peliputan yang baik di masa krisis. Kita baru menyelesaikan Code of Conduct, kode etik dan pedoman perilaku pada masa krisis dan bencana seperti ini. Kita juga menekankan pada praktek peliputan yang baik, dimana mengedepankan transparansi data dan fakta, melakukan peran sebagai watchdog. Juga penting untuk memberikan contoh yang baik kepada publik seperti aksi solidaritas. Kalau meliput bencana itu, jurnalis harus berupaya menyajikan balance information. Tidak hanya bad news soal bencana tersebut. Ini akan menyebabkan fatigue bagi publik dan terbukti saat ini sudah banyak masyarakat yang kelelahan dengan pemberitaan Covid-19. Realitanya memang belum ada perbaikan dari situasi krisis ini.

Di luar konteks itu. Saya salah satu inisiator di Lapor Covid-19. Lapor Covid-19 ini membagikan data dan informasi yang di dalamnya ada jurnalis, scientist, dokter, dan masyarakat umum. Kita membangun pusat data yang sifatnya swadaya dari masyarakat. Misalnya tadi adanya carut-marut data antara pusat dan daerah, kita coba berikan alternatif melalui kanal ini. Disajikan data yang didapatkan dari laporan warga dan sebagainya. Ini juga bisa menjadi sumber data bagi para jurnalis. Teman-teman jurnalis termasuk yang bergabung di JBK juga banyak yang terlibat dalam Lapor Covid-19 ini. Saat ini kita juga sedang melakukan investigasi mengenai excess death karena Covid-19. Gunanya untuk memberikan perbandingan jumlah kematian dari tahun-tahun sebelumnya dengan tahun ini, dan tentunya merujuk pada berbagai indikator.

Memang kerja jurnalis juga diperlukan kolaborasi dengan scientist dan pakar dari berbagai bidang untuk menciptakan transparansi informasi.

**5) Saya menyoroti dua aspek dalam membentuk ketahanan masyarakat yakni solidaritas masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengatasi pandemi ini. Apa yang dapat dilakukan jurnalis melalui medianya masing-masing mendorong kedua aspek ini?**

Ketahanan masyarakat ini sebenarnya sangat bisa diboost oleh media. Pertama tadi, transparansi data dan informasi. Di sisi lain, penting juga media memberikan harapan. Begini gambarannya, Covid ini kan tidak hanya menekan aspek kesehatan, tapi juga berdampak pada aspek sosial dan

ekonomi. Memunculkan pula banyak stigmatisasi bagi ppenyintas. Banyak pasien Covid yang kemudian dikucilkan dari lingkungan sekitar dan lingkungan kerjanya. Nah ini akan mempersulit penanganan wabah juga, karena orang jadi takut dengan stigma tersebut. Makanya kemudian banyak yang menghindari tidak mau dites atau diperiksa. Media di sini bisa memberi contoh baik untuk menganggulangi ini. Misalnya, dulu saya pernah menulis artikel tentang sebuah komunitas di Yogyakarta yang ketika ada satu orang yang positif, justru orang disekitarnya sangat membantu penyintas dan keluarga. Setelah sembuh pun secara sosial diterima kembali di lingkungannya. Informasi inspiratif seperti ini juga diharapkan dapat memberikan dorongan kepada komunitas lainnya untuk bertahan di situasi krisis seperti ini. Tentu dengan tidak melupakan peran media sebagai Watchdog untuk mengawasi kebijakan pemerintah terkait isu ini. Balancing sangat penting dalam hal ini.

Akhir dari komunikasi resiko dimana jurnalis terlibat di dalamnya, sebagai medium penyampai informasi ke masyarakat, yakni berharap masyarakat bisa terbebas dari krisis ini dan tidak menimbulkan krisis baru. Artinya secara kesehatan teratasi, namun juga tidak terjadi chaos secara ekonomi dan sosial. Selain itu juga secara kolaboratif mencari jalan keluar. Covid ini kan juga sebetulnya bisa dicegah melalui protokol kesehatan yang ketat. Media tidak boleh lelah untuk mengingatkan masyarakat untuk tidak boleh lengah dalam penerapan protokol kesehatan.

Beberapa waktu lalu kita tahu bahwa marak terdengar narasi pemerintah untuk jangan banyak memberitakan tentang dampak Covid-19. Karena menurut pemerintah itu dapat mempengaruhi imun. Menurut saya sebagai jurnalis, narasi itu justru keliru. Kalau masyarakat tidak mendapat informasi yang transparan mengenai dampak kesehatan virus ini, apalagi bagi orang-orang yang memiliki komorbid, dan usia tertentu, justru dapat membahayakan. Saya percaya bahwa akhir dari komunikasi resiko yang juga menjadi tujuan dari penerapan komunikasi resiko adalah membuat masyarakat lebih tangguh dan bisa melewati krisis. Maka kuncinya adalah transparansi data dan menyajikan informasi sesuai fakta dan data. Menutup-nutupi resiko bukanlah cara yang bijak karena akan menjadi bom waktu, khawatirnya ketika meledak masyarakat malah menjadi tidak siap, bahwa Covid-9 ini ternyata bukan seperti narasi yang selama ini diglorifikasikan seperti flu biasa.

Ini bisa dibuktikan dengan pengalaman seperti sebelum wabah muncul, narasi seolah Indonesia aman dari wabah justru membuat teragap-agap ketika akhirnya kasus meluas di Indonesia.

WHO juga memberikan panduan mengenai komunikasi resiko. Komunikasi resiko itu sifatnya bukan sosialisasi, tetapi bentuknya dua arah bahkan multiarah, ada interaksi di dalamnya termasuk pemerintah dengan pakar dan masyarakat, terjadi proses timbal balik dan ada evaluasi yang jelas. Bukan malah menjauhkan informasi. Ketika informasi disampaikan dengan terbuka dan seluas mungkin, diharapkan akan diikuti solusi bagaimana untuk mencegah penularan dan dampaknya.

Contoh good case misalnya strategi komunikasi resiko yang dilakukan oleh PM Jerman Angela Merkel. Ia dengan terbuka menyatakan bahwa Covid-19 ini memiliki resiko besar apabila setiap pihak tidak mengantisipasi dengan baik. Komunikator yang baik apalagi di level pemerintahan yang erat dengan kebijakan, harus mampu expect the worst, sehingga ketika sesuatu terjadi setidaknya telah melakukan antisipasi yang terbaik melalui ekspektasinya tadi. Bukan sebaliknya, berekspektasi baik tapi usaha yang dilakukan minim. Kalau mau membuat masyarakat tangguh, harus mempersiapkan masyarakat dengan resiko terburuk tapi juga diiringi dengan informasi yang dapat mengantisipasi hal tersebut terjadi.

Kalau bicara soal solidaritas sosial, maka akan erat hubungannya dengan perbincangan publik di media sosial. Kalau kita melihat situasi saat ini, banyak pro dan kontra terhadap pemerintah dalam menangani wabah. Kira-kira bagaimana media massa melalui prinsip-prinsip jurnalismenya menempatkan diri di tengah perbincangan publik di media sosial?

Kalau saya sendiri, selaku jurnalis, sebelum pandemi sebetulnya saya tidak begitu aktif di Twitter. Setelah pandemi, saya lebih aktif di Twitter. Saya perhatikan, informasi di masyarakat itu menjadi sesuatu yang dikontestasikan. Jadi, narasi yang dibangun akan selalu berbeda-beda sesuai kepentingan masing-masing pihak. Belajar dari jurnalisme, yang bisa diambil adalah memberikan informasi kepada publik sejelas-jelasnya dan sesuai fakta. Saya menulis di media massa melalui karya jurnalistik, tapi berhubung aktivitas masyarakat saat ini juga banyak tersambung dengan media sosial, saya juga menggunakan media sosial terutama Twitter pribadi saya untuk mengamplifikasi informasi yang didapatkan dari kerja jurnalistik saya. Kerap saya share karya jurnalistik yang relevan dengan situasi yang terjadi, serta saya berikan poin-poin penting dari artikel tersebut. Jadi meskipun saya menggunakan media sosial, namun dalam profesi saya dalam menyajikan karya jurnalistik, saya mengedepankan fakta dan data, bukan opini yang mewakili kepentingan saya maupun pihak tertentu apalagi yang berkaitan dengan politik. Kemewahan terbesar seorang jurnalis adalah independensi. Kita tidak terikat pada satu loyalitas pihak tertentu, misal partai atau golongan tertentu. Kita (jurnalis) berpihak pada fakta. Menurut saya, siapa pun yang memiliki informasi yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, penting untuk menyampaikannya ke publik melalui media sosial. Informasi yang baik bukan yang melulu sejalan dengan pemerintah, namun juga yang sesuai fakta.

Saya melihat sosial media sebagai aspek yang penting. Meskipun di dalamnya terhadap hoaks yang pasti melelahkan untuk publik. Apalagi tren saat ini banyak akun-akun yang memang difungsikan sebagai pendengung (buzzer) yang sengaja di-hire suatu pihak untuk mendistrak informasi tertentu dan menimbulkan propaganda. Tapi, saya sendiri sebagai pelaku media sosial juga melakukan itu dengan kesadaran dan kemauan saya sendiri. Intinya, aktif namun tetap memperhatikan rambu-rambu tertentu, termasuk UU ITE. Hindari sentimen personal dan seterusnya.

**6) Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh jurnalis, terutama oleh Jurnalis Bencana dan Krisis untuk meng-counter hoaks dan infodemik?**

Pertama, memberikan fakta, atau fakta tanding. Apabila ada infodemik, maka perlu di-counter dengan fakta yang berbasis data maupun ilmu pengetahuan. Ada satu hal yang sering luput adalah misinformasi itu selalu dianggap diproduksi oleh masyarakat. Padahal misinformasi juga bisa saja dari pemerintah. Maka itu, saya menekankan pada independensi media dan individu, terutama di media sosial. Di ranah media sosial banyak sekali bias, kita tidak tahun kita berinteraksi dengan netizen yang memiliki kepentingan apa dibaliknya, conflict of interest apa yang ia tekankan. Di sinilah pentingnya orang-orang yang memiliki source yang mumpuni dan bisa mempertanggungjawabkan kredibilitasnya untuk mendorong masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan mencerahkan.

Misal soal data kematian tadi, adanya selisih angka kematian di pusat data, saya sampaikan melalui karya jurnalistik dan juga melalui media sosial yang saya akses. Menurut saya penting untuk disampaikan.

Pada intinya, hoaks itu akan menjadi sebuah informasi yang diyakini dan dipercaya apabila tidak di-counter dengan informasi yang telah melalui verifikasi. Misal beberapa waktu lalu, ada informasi beredar bahwa vaksin yang dibeli pemerintah sudah lolos uji klinis fase tiga, dan informasi itu disampaikan oleh salah satu pejabat di Kemenkes. Padahal faktanya, belum ada vaksin Covid-19 yang lolos uji klinis fase tiga di dunia. Yang ada hanya data yang bersifat sementara karena seluruh fase uji klinisnya belum selesai.

Contoh lainnya Kemenkes mendapat apresiasi dari WHO karena sukses menangani pandemi di Indonesia. Padahal kenyataannya bukan seperti itu, melainkan undangan itu untuk melakukan monitoring dan evaluasi penanganan wabah. Media massa memiliki tugas untuk memberikan pencerahan mengenai situasi yang sesungguhnya. Memang tak dapat dipungkiri bahwa misinformasi bisa datang dari pemerintah. Maka penting sekali aspek independensi ditegakkan oleh media, baik media massa maupun netizen di media sosial.

Kalau mengacu pada 9 Elemen Jurnalistik dari Bill Kovach dan Tom Rosentiel, dua di antaranya berpihak pada fakta dengan melakukan verifikasi dan berpihak pada publik atau independen dalam melakukan kerja jurnalistik. Itu adalah kunci dalam jurnalisme, baik media mainstream maupun media sosial yang mengandalkan citizen journalism.

<b>Narasumber</b>	<b>Dyna Rochmyaningsih – Direktur eksekutif The Society of Science Journalists Indonesia</b>
<b>Waktu Wawancara</b>	<b>5 November 2020</b>
<p>1) Bagaimana jurnalis melalui media massa membangun narasi mengenai Covid-19?</p> <p>Jurnalis di dunia tergagap-gagap menghadapi ini, karena merupakan virus baru. Jurnalis yang biasa meng-cover isu-isu umum kebingungan bagaimana</p>	

caranya mereportase mengenai virus ini pada awal pandemi. Jurnalis di Indonesia sendiri belum banyak yang paham apa itu virus, apa itu epidemiologi.

Ketika Jakarta pertama kali lockdown pada Maret 2020, SISJ merasa ada sebuah urgensi untuk memberi pengetahuan mengenai jurnalisme sains kepada wartawan2 di Indonesia. Kita bekerjasama dengan AJI Jakarta dan mengumpulkan sekitar 200 wartawan di WhatsApp group. Tadinya kita akan langsung mengadakan kegiatan di AIPI tepat di hari pertama lockdown (14 Maret 2020), tapi ternyata tidak memungkinkan dan akhirnya kita terhubung melalui online. Akhirnya kami menghubungkan wartawan-wartawan ini dengan scientist yang capable untuk memberikan pengetahuan mengenai dasar-dasar peliputan pandemi. Setelah workshop, berbagai media, National Geographic, Detik, Liputan 6, hampir semua media ikut dan mereportase pendapat scientist seperti Pak Ahmad Utomo yang merupakan pakar biologi molekuler, kemudian Pak Berry Juliandi, dan berbagai narasumber epidemiolog.

Saya berbicara mengenai jurnalisme sains. Ada perbaikan peliputan tentang pandemi oleh media-media di Indonesia. Namun, seiring dengan berkembangnya pandemi, respon pemerintah yang mungkin banyak dinilai jurnalis dan media termasuk lambat, dan banyak juga (respon) yang kemudian dikritisi oleh jurnalis tersebut. Saya kira sampai sekarang jurnalis berperan penting untuk menjaga respon pemerintah untuk on track (dalam penanganan pandemi).

Tapi kemudian ada hal-hal baru yang muncul. Ini juga merupakan respon di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Seperti misalnya fenomena soal (konsumsi) empon-empon, kalun anti corona, seperti semua orang berlomba-lomba untuk memberikan informasi menengani obat. Sayangnya di sini (di Indonesia) banyak jurnalis yang kemudian terbawa untuk menarasikan pemberitaan tersebut tanpa dasar scientific. Sehingga terjadi polarisasi masyarakat ada yang percaya terhadap corona, yang tidak percaya terhadap corona. Ada pula yang percaya dengan medis dan yang tidak seperti hal-hal yang didapat dari infodemi tersebut.

**2) Apakah setelah itu ada perubahan signifikan dalam pemberitaan misal tadinya narasi mengarah sejalan dengan pemerintah kemudian menjadi ke arah mengkritisi?**

Ada. Pada saat itu kita menawarkan sebuah alternatif, otoritas keilmuan baru di samping peneliti dan ilmuwan pemerintah. Contoh, di Satgas Penanganan Covid-19, pemerintah telah menunjuk ilmuwan-ilmuwan untuk terlibat. Seandainya, jurnalis-jurnalis ini tidak memiliki akses terhadap ilmuwan independen yang memiliki kapabilitas dalam hal itu, mungkin narasi di media sekarang malah tidak ada narasi kritis terhadap pemerintah.

Namun, yang ingin saya garisbawahi, bukan hanya media mainstream saja seperti Kompas, Tempo, Tirta, Narasi dan lain sebagainya, tapi juga muncul ilmuwan-ilmuwan independen di media sosial. Seperti Pak Ahmad Utomo, beliau seringkali sejak awal pandemi memberikan pandangan dan pengetahuannya mengenai virologi dan mollecular biology dari virus itu. Kemudian ada juga Pak Pandu Riono yang terus menerus memberikan

pengetahuan kepada masyarakat melalui akun media sosialnya mengenai virus itu. Jadi ada alternatif lain selain sains yang disodorkan pemerintah tentu lewat kanal media mainstream.

Dari perpektif jurnalisme sains, bagaimana jurnalisme mengcapture dan menyajikan pemberitaan mengenai langkah kebijakan yang diambil pemerintah? Terutama di masa new normal saat ini yang kita tahu sudah banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan baik dalam rangka memutus rantai penyebaran virus maupun memperkuat perekonomian.

Ini agak susah. Setelah upaya kita mengumpulkan 200 wartawan dan bekerjasama dengan AJI, kita ada workshop tentang peliputan pandemi, kemudian SISJ merekrut anggota baru yakni ilmuwan-ilmuwan dan juga wartawan yang punya concern dengan jurnalisme sains.

Contohnya penggunaan rapid test. Sudah banyak diskusi antara jurnalis dengan ilmuwan bahwa langkah tersebut bukanlah hal yang tepat dan harus segera dicabut. Itu sudah beberapa kali ditulis dalam laporan seperti TEMPO, kemudian CNN. Media terus mendorong bahwa penggunaan rapid test bukan langkah yang tepat. Tapi sampai sekarang pemerintah belum mengambil kebijakan di luar itu. Sampai sekarang, kita (jurnalis) juga belum tahu mengapa rapid test masih terus digunakan. Satu hal yang aneh sebetulnya, dimana di luar negeri justru rapid yang menunjukkan memiliki antibodi malah diperbolehkan untuk keluar/masuk negara, seperti passport begitu ya. Sedang di sini kalau reaktif justru menjadi suspect. SISJ menghubungkan jurnalis dengan ilmuwan yang kompeten di bidangnya.

Kemudian ketika pemerintah mulai menggaungkan narasi new normal dan bersiap melakukan transisi dari PSBB ketat. Kita ketahui ada pro dan kontra pada waktu itu. Pada saat itu, bagaimana jurnalisme di Indonesia mengemas narasi mengenai rencana peralihan new normal?

Waktu itu SISJ tidak terlalu banyak mendiskusikan tentang new normal. Kita berfokus pada sains di balik kebijakan itu. Jelas, pada saat itu, kita sebetulnya belum bisa untuk beralih ke new normal. Tapi kemudian pemerintah tetap dengan kebijakannya, dengan pertimbangan dibaliknya.

Kita selaku jurnalis, meliput suatu isu tentu menggunakan konsep jurnalisme dengan melihat dari dua sisi. Kita mencoba memahami pertimbangan yang diambil oleh pemerintah. Akhirnya SISJ mengundang Pak Yanuar Nugroho, Pak Ali Ghufron yang sekarang menjabat sebagai Dirjen di Ristekdikti. Kemudian Pak Rudi dari LIPI. Kita berdiskusi dan mencoba memahami bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah tidak bisa hanya berdasar sains. Ada pertimbangan ekonomi, sosial, dan itu ranahnya public policy. Ini semua tergantung karakter pemimpin. Kalau kita bandingkan dengan Jerman, PM Angela Merkel yang basicnya memang sains, ia mengambil kebijakan dengan penghitungan arnaults, menggunakan dasar epidimiologi dan secara matematis. Namun di negara kita, Presiden memiliki pemikiran dan pertimbangannya sendiri, yang mana SISJ juga belum mengetahui pasti mengapa kemudian harus beralih ke new normal.

Di Indonesia ada banyak orang yang mata pencahariannya bisa mengandalkan kegiatan di dalam rumah. Saya, sebagai warga Sumatera

Utara, menyaksikan sendiri bahwa di sini bukan hal yang umum untuk bekerja dari rumah. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di Sumatera Utara mengatakan kepada saya bahwa mata pencaharian di Sumatera Utara mengandalkan sektor perkebunan. Itu pun dibayarnya perhari. Pekerja informal di sini jumlahnya besar. Ini kemudian menjadi alasan mengapa new normal perlu dilakukan. Namun yang jelas, banyak kebijakan di Indonesia yang berkaitan dengan Covid-19 belum berdasar pada sains.

**3) Beberapa aspek berpengaruh untuk membangun ketahanan masyarakat, di antaranya solidaritas masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apa yang dapat dilakukan oleh media massa dalam upaya membangun ketahanan masyarakat ini?**

Saya lebih melihat peran teknologi dalam menggalang solidaritas masyarakat. Di luar media mainstream, sudah terjadi penggalangan dukungan. Mereka-mereka yang memiliki expertise di bidang ini ikut urun. Netizen apalagi di Twitter ini juga luar biasa dukungannya untuk satu sama lain. Kalau bicara kaitannya dengan ketahanan masyarakat, kesadaran mereka untuk jangan sampai terinfeksi virus corona juga merupakan bentuk ketahanan masyarakat.

Ketahanan di sini bagaimana wartawan dan ilmuwan memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat. Nah untuk netizen juga sudah berjalan dengan baik, meskipun juga harus bertarung dengan hoaks dan infodemi di ranah media sosial. Teman-teman di Kawal Covid, MAFINDO, pun sudah bekerja dengan baik. Menurut saya, bagi orang-orang yang memiliki akses terhadap teknologi, infodemi tidak begitu berpengaruh. Tapi bagi orang-orang di wilayah pedesaan, atau di daerah seperti saya di Sumatera Utara, mereka tidak bisa memisahkan mana expert yang bisa dipercaya maupun tidak. Mereka juga tidak mengakses media massa seperti koran. Koran lokal pun tidak terdistribusi dengan baik di sini. Mereka mengandalkan informasi paling dari Facebook, Twitter tidak familiar. Banyak anggapan di masyarakat terkait virus ini, seperti kebenaran mengenai virusnya sampai dengan isu rumah sakit meng-covid-kan pasien.

Maka ketahanan masyarakat seperti ini lah yang perlu diperkuat. Perangkat desa memiliki andil yang besar dalam hal ini untuk membangun pemahaman di rural area. Orang-orang yang memiliki pengetahuan, orang-orang yang memiliki otoritas kemudian bertanggungjawab secara sosial untuk mentransfer pengetahuan mengenai pandemi ini. Termasuk pengelola perkebunan, seperti itu.

**4) Bagaimana jurnalis melalui payungnya, media massa, memandang respons masyarakat yang kini semakin terbuka dengan adanya platform seperti Twitter yang memungkinkan masyarakat untuk menanggapi pemberitaan di media massa?**

Teknologi seperti dua bilah mata pisau. Infodemi banyak sekali diproduksi oleh akun fiktif yang bisa saja berkembang dan sampai ke orang-orang melalui algoritma. Wartawan pun kerap kali merasa kuwalahan menghadapi terpaan informasi yang salah seperti ini. Ada pendekatan dalam jurnalisme, yang digunakan oleh wartawan, ketika kita menulis berita kita harus mempunyai news value. News value itu ya pemberitaan yang banyak

diperbincangkan oleh masyarakat. Di sini terjadi timbal balik melalui adanya platform tadi. Prinsip ini menggambarkan kerja jurnalisisme, because that's just how they work. Bagusnya, saya melihat sisi positifnya, setelah berdiskusi dengan profesor di bidang science journalism di Belmont University, beliau mengatakan bahwa media sosial memberikan kanal alternatif, terutama di pemerintah yang bersifat otoritarian. Otoritarian saat ini juga tidak bisa disamakan dengan zaman dahulu. Peran watchdog saat ini bisa dilakukan oleh jurnalis, masyarakat, termasuk melalui platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram. Seperti yang dilakukan oleh Narasi TV, memang tidak berhubungan dengan pandemi. Mereka sempat menaikkan analisis video CCTV tentang siapa pelaku pembakaran halte Sarinah. Mereka memanfaatkan informasi yang bisa diakses oleh publik melalui internet. Itu menjadi satu hal positif, adanya tawaran narasi alternatif mengenai isu yang ada.

**5) Bagaimana jurnalis kemudian memposisikan diri mengenai tatakelola penanganan Covid-19 melalui prinsip independensi ketika mengkritisi kebijakan?**

Kita (jurnalis) hanya boleh memasukkan fakta-fakta yang ada terkait isu tersebut. Kalau saya dan teman-teman pelaku jurnalisisme sains, kita menyajikan narasi yang sesuai dengan fakta-fakta ilmiah. Jika fakta ilmiah yang ditemukan ternyata bertentangan dengan kebijakan pemerintah (dalam menangani Covid-19), saya kira tidak bisa jurnalis sains tersebut dikatakan memasukkan opini pribadinya. We stick to report the facts.

**6) Jurnalisme sains mungkin belum banyak diketahui orang. Bagaimana kondisi dan perkembangan jurnalisme sains di Indonesia saat ini?**

Saat ini yang jelas melalui SISJ kita berusaha untuk menjangkau teman-teman di daerah. SISJ ini berdiri tahun 2014 dan mulanya memang kita hanya mampu me-reach out media mainstream di Jakarta. Kalau saya sendiri bekerja untuk media internasional dan desk-nya memang seputar sains, nature, dan lainnya. Kita tahu sebetulnya masyarakat Indonesia tidak banyak yang tertarik untuk membaca topik tersebut. Terutama masyarakat di daerah.

Setelah workshop dengan AJI pada masa awal pandemi, kita mengadakan one on one jurnalisme sains dengan teman-teman jurnalis di daerah. Beberapa bulan setelahnya juga kita mengajarkan tentang bagaimana membaca dan merangkum jurnal-jurnal internasional yang kemudian isinya bisa disarikan ke dalam artikel sebagai referensi. Kita fokus melalui virtual meeting. Cara membaca paper ilmiah kan susah-susah gampang. Apalagi sejak memasuki masa pandemi ini paper mengenai Covid-19 melalui tinjauan berbagai aspek itu banyak sekali, sangat cepat perkembangannya. Itu merupakan pengetahuan baru, seperti masker dulu di awal yang pakai hanya orang-orang tertentu saja, sekarang diwajibkan untuk semua orang. Kita adakan workshop dengan mengundang Pak Berry Juliandi dari Akademi Ilmuwan Muda Indonesia untuk memperkenalkan hal tersebut. Ini merupakan skill dasar bagi teman-teman jurnalis. Sayangnya yang concern terhadap jurnalisme sains ini hanya jurnalis di media ternama. Anggota kita juga ada ilmuwan-ilmuwan dari Eijkman, UI, ITB, UNAIR, mereka memberikan komentar dan arahan mengenai perkembangan paper-paper. Memastikan

bahwa jurnalis ini tidak salah mengartikan isi dari tulisan ilmiah. Menurut kami ini penting apalagi selanjutnya jurnalis inilah yang menyarikan dan menyebarkan kepada masyarakat melalui artikel di medianya masing-masing. Melalui network dengan wartawan di daerah semoga jurnalisme sains ini dapat terus berkembang.

<b>Narasumber</b>	<b>Aribowo Sasmito – Co-Founder Masyarakat Anti Fitnah dan Hoaks</b>
<b>Waktu Wawancara</b>	<b>3 November 2020</b>
<p><b>Media arus utama memberitakan mengenai kebijakan pemerintah terkait <i>New Normal</i>.</b></p> <p>Blunder pemerintah ketika pemerintah menyatakan bahwa A maka A selesai tanpa pernyataan dan bantahan dari pihak lain justru memperparah keadaan (ex: Jhonny G Plate).</p> <p>Banyak isu yang digoreng dari apa yang dikatakan pemerintah. Sejak dulu kepercayaan publik memang tidak begitu bagus kepada pemerintah.</p> <p>Era keterbukaan saat ini juga semakin baik dengan keterbukaan informasi yang di amplifikasi oleh media sosial. Tidak seperti dulu terutama orde baru.</p> <p>Era keterbukaan memiliki dua sisi, baik dan buruk. Ahli pun yang sebetulnya memiliki kredibilitas, banyak yang tidak kompak. Contoh, Covid-19 bisa menular melalui <i>airbone</i>, kemudian orang yang memakai masker hanya yang sakit, informasi-informasi ini cepat sekali berubah seiring dengan perkembangan penelitian dan dampak dari era keterbukaan.</p> <p>Pemerintah menjadi bulan-bulanan, kepercayaan terhadap media pun dihadapkan pada kehadiran media sosial dimana banyak narasi yang beredar di sana. Di Indonesia, meskipun memang tidak begitu baik dalam literasi informasi, tapi proporsi masyarakat yang percaya terhadap informasi di media massa lebih banyak dibanding dengan masyarakat yang percaya terhadap informasi di media sosial.</p> <p>Media massa terutama <i>online</i> ini tidak bisa terus menerus disalahkan pada situasi seperti maraknya klikbait dan lain sebagainya. Begitu juga dengan istilah <i>bad news is a good news</i>. Situasi ini tidak bisa terus menerus disalahkan pada media, ini mengikuti hukum pasar. Tidak bisa dipungkiri, kondisi di Indonesia, terutama sejak media sosial ini semakin digandrungi, pemberitaan yang sifatnya <i>bad news</i> justru mendapat perhatian lebih besar. Akan selalu ada pembelaan seperti “kalau tidak dipancing klikbait, masyarakat tidak tertarik untuk membaca berita”. Pun pada kenyataannya, <i>bad news</i> selalu mendapatkan perhatian melalui engagement netizen yang lebih tinggi. Jika diperhatikan <i>comment, like, and share</i> pada <i>bad news</i> selalu lebih tinggi dibandingkan dengan <i>good news</i>. Tidak semata-mata menjadi tanggungjawab produsen tetapi juga konsumen. Sama halnya dengan hoaks, hoaks terus menyebar karena <i>share rate</i>-nya tinggi, sehingga yang memproduksi hoaks akan terus bekerja karena tujuannya tercapai.</p> <p><b>Netizen Menanggapi Terpaan Pemberitaan di Twitter</b></p> <p>Tipikal netizen di Indonesia yang memang gemar mengomentari berbagai hal. Sebuah pemberitaan yang di <i>share</i> melalui cuitan memang sering kali menjadi lapak bagi netizen ini beradu argumen. Untuk jumlah angka saya tidak bisa</p>	

menyebutkan pasti, namun proporsi akun yang tidak produktif jumlahnya lebih besar daripada akun yang produktif. Semakin banyak bantah-batahan dari para netizen ini maka akan terus meningkat *engagement*-nya dan isu tersebut semakin populer.

Di Twitter ada akun bernama Klik Update, jadi mereka bekerja dengan mencuplik judul dan sedikit isi berita dari media sehingga netizen yang membaca cuitan tersebut tanpa harus membaca keseluruhan isi berita. Akun seperti ini memang tidak banyak, tapi membuktikan bahwa yang seperti ini laku di Indonesia. Jadi kalau bicara soal *clickbait*, tidak bisa sepenuhnya disalahkan payung medianya. Ini sudah menjadi ekosistem, ada media massa, media sosial, dan netizen di dalamnya.

Ini faktor yang sebetulnya disadari dan bisa dikendalikan oleh pengguna. Tapi ada faktor lain juga yang berpengaruh. Kita bicara soal media sosial berarti kita bicara soal algoritma. Saya berikan skema contohnya seperti ini, ada satu *tweet* pemberitaan tentang sebuah isu, di Twitter algoritma bekerja juga untuk *top commenter*.

Selama ini memang seperti itu, bukan hanya isu covid, tapi beragam isu terutama politik. Tapi bicara pembelahan opini publik, sangat dipengaruhi oleh akun-akun bot. Ada banyak akun yang memang dipergunakan untuk menyebarkan suatu pesan, bahkan bisa diketahui polanya.

Media sosial memang memiliki banyak plus minus, salah satunya membuka celah bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi kebijakan publik dengan adanya keterbukaan. Namun yang disayangkan, tidak sedikit argumen yang diangkat justru berupa informasi yang salah, yang lagi-lagi, sumbernya pun tidak sedikit yang dari media sosial. Contohnya, di awal ketika Covid-19 muncul di berbagai negara, banyak sekali wacana yang tidak berdasar ilmiah, seperti konspirasi-konspirasi di balik covid, kemudian berbagai cara untuk menghindari virus ini seperti mandi air laut. Ini semua akhirnya adalah fenomena *the death of expertise* atau matinya kepakaran. Jadi mau sebanyak apapun pakar yang menyampaikan bahaya dari virus ini, serta menepis infodemic, justru tidak dipercaya. Era sekarang, karena siapa pun merasa bisa memberikan informasi, justru bisa menjadi *blunder*.

Kembali lagi soal peran media massa, media di Indonesia boleh dikatakan salah satu kurangnya adalah memberikan panggung bagi orang-orang yang kontribusinya kurang bagi kemajuan. Tapi tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada media, orang-orang ini menjadi *newsmaker* karena memang masyarakat pun terus mengonsumsi pemberitaan tentang orang-orang tersebut. Di sisi lain, media juga sudah menjalankan prinsip *cover both side*, jadi jurnalis tidak hanya memberitakan isu dari pendapat satu pihak.

*Cover both side* pun ternyata juga menghadapi tantangan tersendiri, masyarakat di era *post truth* saat ini lebih percaya pada apa yang mereka suka. Maka tidak heran di balik carut-marut yang disebabkan oleh Covid-19, infodemi bahkan konspirasi pun terus menggaung. Ini kemudian menyebabkan terjadinya polarisasi antara masyarakat yang percaya dan *aware* dengan covid dan kelompok masyarakat yang tidak percaya serta abai terhadap bahaya covid.

### **Respon masyarakat menyoal pemberitaan yang tampil di linimasa**

MAFINDO yang secara khusus memang menaungi isu terkait hoaks dan *hate speech* melakukan upaya yang bentuknya antisipatif, contohnya kita punya *platform* podcast yang hadir untuk memberikan pencerahan terhadap suatu isu

bekerjasama dengan Radio KBR sebagai tim cek fakta. Kita selalu menggaungkan jargon “jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum bagi”. Kami mengamati bahwa orang-orang melontarkan *hate speech*, menyebarkan hoaks sebagaimana ini berangkat dari emosi.

Untuk memicu emosi orang Indonesia ini kan sebetulnya mudah, karena basis kita ini kebanyakan *religy* dan *family oriented*, jadi untuk memancing emosi paling sering menggunakan isu SARA.

Kegiatan kami (MAFINDO) yang berkaitan dengan periksa fakta seperti webinar, sosialisasi, cek fakta secara live, itu semua sifatnya ajakan. Kami tidak akan klaim sebagai yang pertama untuk memberantas hoaks dan *hate speech*. Dari dulu komunitas kami sebelum menjadi MAFINDO, kita gencar untuk mensosialisasi bahaya hoaks. Semakin ke sini, bisa saya katakan mungkin gencar-gencarnya pada 2017-2018, berbagai lembaga mulai dari POLRI dan pemerintahan gencar untuk menggaungkan bahaya hoaks. Saya analogikan dengan kiasan “*it takes two to tango*”, kita bisa mengajak masyarakat untuk *aware* terhadap hoaks, tapi yang diajak juga harus kooperatif untuk bisa mencapai tujuan itu. Dengan gayung bersambut, apalagi di era pandemi saat ini, kita semua masyarakat sedunia akan lebih baik dalam hal konsumsi informasi atau literasi digital masyarakat.

Bagaimana untuk meningkatkan literasi digital?

Saat ini, kalau kaitannya dengan Covid, saya melihat pemahaman masyarakat mengenai covid semakin baik. Penggunaan masker juga terus meningkat menunjukkan masyarakat mulai *accepting* keadaan pandemi ini. Tapi kalau kita kembali lagi kepada basic-nya, yang ideal itu seharusnya muncul edukasi literasi dahulu, baru kemudian muncul inovasi media sosial. Nah, kejadiannya sudah seperti saat ini, edukasi literasi ini kan butuh waktu dan berkaitan dengan merubah kebiasaan serta *mindset* orang secara luas. Akan menjadi proses yang lama dan menahun. Menurut kami, dengan menekankan pada edukasi literasi merupakan cara terbaik untuk memperbaiki situasi ini. Kita bandingkan dengan perundang-undangan atau peraturan. Akan muncul banyak pro kontra seperti pemerintah seolah berupaya untuk menekan kebebasan berbicara dan sebagainya. Pendekatan dari sisi hukum penting, tapi itu hal yang instan, bukan yang terbaik untuk jangka panjang. Karena media sosial akan terus berkembang.

MAFINDO dibangun bukan hanya hadir dalam bentuk daring, kita terus berupaya meningkatkan *awareness* publik akan informasi yang berkualitas dan menghindari hoaks. Salah satu program yang sedang digalakan saat ini adalah Tular Nalar, kami melibatkan guru-guru untuk mulai mengedukasi kepada murid-murid di sekolah mengenai literasi informasi dan literasi digital. Saat ini memang masih terbatas di beberapa sekolah melalui ToT (*Training of Trainers*), selanjutnya akan ditularkan ke sekolah-sekolah secara nasional.

Orang-orang yang menyebarkan konspirasi pun terus bergerak meskipun saat ini kita sudah memasuki tahap ada harapan untuk vaksin. Bahkan isu-isu untuk menghindari vaksin terus dihembuskan.

### **Kerjasama dengan AMSI**

Berdirinya MAFINDO ini menggunakan *multiple approach*. Kami sadar kegiatan kita seperti periksa fakta tidak bisa sendiri. Maka kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Dalam hal jurnalisme media massa kita bekerjasama dengan Google News Initiative dan AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia). Kalau

dengan AMSI kita buat *platform* cekfakta.com, pemeriksa fakta di komunitas bekerja sama dengan pemeriksa fakta dari media. Kita tahu kapasitas MAFINDO bukanlah sebagai media, jadi kita butuh klarifikasi atas berbagai isu melalui jurnalis dari berbagai media, mereka akan mengangkat isu tersebut menjadi artikel, dan kita akan *relay*. Di samping itu, kita juga bekerja sama dengan AJI (Aliansi Jurnalis Independen) yang juga *linked* dengan GNI. Bentuk kerjasamanya berupa kegiatan pelatihan Google News Initiatives. Bentuknya *training* untuk membentuk komunitas untuk periksa fakta. Sudah ada 60 orang yang *certified*, kebanyakan jurnalis atau koresponden media di daerah. Diharapkan setelah mendapatkan pelatihan mereka dapat membagikan ilmunya di daerah masing-masing.

Seperti ketika jelang Pilpres 2019, 40-50 jurnalis dari berbagai media berkumpul di kantor Google Indonesia, ketika kandidat capres maupun cawapres menyebutkan data terkait isu yang sedang dibahas, kami bersama-sama mencari fakta tentang data tersebut dari berbagai sumber didukung oleh Google. Hasilnya variatif, bisa cepat bahkan berbeda hari, tergantung dari kompleksitas datanya.

Untuk isu Covid-19, salah satunya ketika beberapa waktu lalu viral Artis Anji dengan seseorang yang disebut profesor mengusung obat Covid-19. Tim cek fakta secara kolaboratif bersama jurnalis di berbagai media bergerak untuk mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, seperti jurnalis mewawancarai dokter dan lain sebagainya. Selain itu, di awal kemunculan Covid-19 di Indonesia ini kan yang dikhawatirkan kalau muncul kluster dari tempat publik. Kita sering melakukan klarifikasi melalui *tweet* berdasar pada hasil laporan jurnalis di berbagai media mengenai penularan Covid di suatu komunitas misalnya.

## RIWAYAT HIDUP PENELITI



Hana Nabila, lahir di Jakarta pada 21 Juli 1995. Anak pertama dari pasangan Bapak Mustholihin Majid dan Ibu Zainiah Madjid. Menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 2006, pendidikan SMP di SMP Negeri 2 Depok pada tahun 2010, SMA di SMA Negeri 5 Depok pada tahun 2013, dan Sarjana (S1) Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo pada tahun 2018. Pada tahun 2019 peneliti melanjutkan studi pada program Magister (S2) Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan. Peneliti pernah bekerja sebagai Analis Media Litbang Harian Kompas Jakarta pada tahun 2018 sampai dengan 2019.